BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Teori atau pernyataan yang digunakan sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian, yang difokuskan kepada literatur-literatur yang membahas konsep penelitian.

2.1.1 Pengendalian Internal

2.1.1.1 Pengertian Pengendalian Internal

Adapun defenisi pengendalian internal yang dinyatakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

Committee of Sponsoring Organizations of Tread way Commission (COSO) (2013:3) *Internal control is*

> "*A process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance*".

IAPI (2011:319.2) yang dikutip oleh Sukrisno Agoes (2012:100) mendefinisikan Pengendalian internal sebagai:

> "Suatu proses yang di jalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) Keandalan laporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku".

Menurut William F. Messier, Steven M. Glover, dan Douglas F. Prawitt (2014:110) Pengendalian internal adalah

> "Label yang diberikan kebijakan dan prosedur entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai pada pencapaian tujuan entitas.

> Pengendalian internal ditetapkan okeh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya".

Menurut *American Institute Certified Public Accountant* pada tahun 1949 dalam buku Karyano (2013:48-49) *Internal Control is*

> *"Comprises the plan of an organization and all of the coordinate methods and measures adopted within a business to safe guards its assets, check the accuracy and reliability of accounting data, promote operational efficiency, and encourage adherence to prescribed managerial policies".*

Dari definisi-defenisi yang telah dipaparkan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Tujuan Pengendalian Internal

Adanya hubungan langsung antara tujuan entitas dan pengendalian internal yang mengimplementasikannya untuk mencapai tujuan entitas, manajemen dapat menentukan potensi resiko dan merancang pengendalain Internal. Tujuan pengendalian intenal secara garis besarnya menurut COSO (2013:2) tujuan dari pengendalian internal terdiri dari:

1) *Operations Objectives.*
2) *Reporting Objectives.*
3) *Compliance Objectives.*

Adapun penjelasan dari tiga tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1) *Operations Objectives.*
   Tujuan operasional terkait dengan pencapaian visi, misi, dan tujuan didirikannya entitas. Tujuan ini terkait dengan peningkatan *financial performance,* produktivitas, kualitas, *enviromental practices, return of assets,* dan likuiditas. Salah satu tujuan yang terkait dengan tujuan operasional adalah pengamanan aset. Entitas dapat menentukan tujuan yang terkait dengan pencegahan kehilangan aset serta secara periodik mendeteksi dan melaporkan kehilangan aset.
2) *Reporting Objectives.*
   Tujuan pelaporan berkaitan dengan penyusunan laporan untuk digunakan oleh organisasi dan *stakeholders* dalam hubungannya dengan pelaporan *finansial/non-finansial* serta pelaporan eksternal/internal. Karakteristik dari pelaporan *finansial/non-finansial* eksternal adalah disesuaikan dengan aturan dan kebutuhan eksternal, dipersiapkan sesuai dengan standar eksternal, dan mungkin diharuskan menurut regulator, kontrak, dan perjanjian. Sedangkan karakteristik pelaporan *finansial/non-finansial* internal adalah digunakan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan bisnis serta ditetapkan oleh manajemen dan *board*.
3) *Compliance Objectives.*
   Aturan dan hukum merupakan standar minimal dari perilaku organisasi. Organisasi diharapkan akan menggabungkan standar tersebut ke dalam tujuan dari entitas, bahkan organisasi dapat menetapkan standar yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan. Misalnya dalam hal pelaporan keuangan, dapat menjadi dasar bagi manajemen dalam melakukan *review* dalam kinerja operasionalnya serta kepatuhannya terhadap aturan. Selain itu, pengamanan aset yang merupakan salah satu contoh tujuan operasional juga berpengaruh terhadap ketepatan jumlah aset dalam pelaporan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penetapan tujuan-tujuan ini tetap saling berkesinambungkan, tapi tetap bergantung dengan situasi yang ada.

2.1.1.3 Indikator Pengendalian Internal

Kerangka kinerja pengendalian internal yang dikeluarkan oleh *committee of sponsoring organizations (COSO) (2013:5)."Internal control consists of five integrated components:*

1) *Control Environment*
2) *Risk Assessment*
3) *Control Activities*
4) *Information And Communication*
5) *Monitoring Activities"*

Adapun hubungan diantara kelima tujuan dan komponen-komponen pengendalian internal tersebut digambarkan oleh COSO dalam bentuk kubus sebagai berikut:



Internal Control – Integrated Framework

Gambar 2.1
Komponen Pengendalian Intenal
Sumber: COSO 2013:5

Berdasarkan gambar tersebut menjelaskan bahwa ada suatu hubungan langsung antara tujuan-tujuan sebagai apa yang hendak dicapai entitas dengan komponen-komponen pengendalian internal yang mewakili apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan itu, serta struktur organisasi entitas pada setiap tingkatan (divisi, unit, operasi, fungsi, dan lainnya). Ketiga kategori tujuan tersebut (operasi, pelaporan, dan ketaatan) diwakili oleh kolom, kemudian kelima komponen pengendalian internal diwakili oleh baris, sedangkan struktur organisasi entitas direpresentasikan oleh ketiga dimensinya.

Adapun penjelasan dari Lima komponen pengendalian internal menurut Coso (2013:5) adalah sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
   Lingkungan pengendalian adalah rangkaian standar, proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian internal di seluruh organisasi. Terdapat lima prinsip yang terkait dengan komponen ini yaitu:
   a) Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika
   b) *Board of directors* menunjukkan independensi dari manajemen dan melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pelaksanaan pengendalian internal.
   c) Dengan pengawasan *Board*, manajemen menetapkan struktur, bentuk pelaporan, tanggung jawab dan otoritas yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan.
   d) Organisasi menetapkan komitmen dalam menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten dalam rangka pencapaian tujuan.
   e) Organisasi memegang individu yang bertanggungjawab dalam pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan.
2) Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
   Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk mencapai tujuan, serta membentuk dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola. Terdapat empat prinsip yang berkaitan dengan komponen ini yaitu:
   a) Organisasi menentukan tujuan yang spesifik sehingga memungkinkan untuk dilakukan identifikasi dan penilaian risiko yang terkait dengan tujuan.
   b) Organisasi mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan di seluruh entitas dan menganalisis risiko untuk menjadi dasar bagaimana risiko akan diperlakukan.
   c) Organisasi mempertimbangkan potensi fraud dalam penilaian risiko.
   d) Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang akan memengaruhi sistem pengendalian internal secara signifikan.
3) Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
   Aktivitas Pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan dengan prosedur dan kebijakan untuk meyakinkan bahwa manajemen telah mengarah untuk memitigasi risiko dalam rangka pencapaian tujuan. Terdapat tiga prinsip dalam komponen ini yaitu:
   a) Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima dalam rangka pencapaian tujuan.
   b) Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian secara umum terkait teknologi dalam rangka pencapaian tujuan.
   c) Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan prosedur dalam pengimplementasiannya.
4) Informasi Dan Komunikasi (*Information And Communication*)
   Informasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan. Sedangkan komunikasi terjadi baik secara internal maupun eksternal dengan

menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian internal sehari-hari. Terdapat tiga prinsip dalam komponen ini yaitu:

a) Organisasi memperoleh dan menggunakan informasi yang berkualitas dan relevan dalam rangka mendukung fungsi dari komponen lain dalam pengendalian internal.
b) Organisasi secara internal mengomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi dari komponen lain dari pengendalian internal.
c) Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal terkait hal yang mempengaruhi fungsi dari komponen lain dalam pengendalian internal.

5) Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)
Evaluasi berkelanjutan, terpisah, atau kombinasi keduanya untuk memastikan seluruh komponen pengendalian internal ada dan berfungsi. Terdapat dua prinsip dalam komponen ini yaitu:

a) Organisasi memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah untuk memastikan seluruh komponen pengendalian internal ada dan berfungsi.
b) Organisasi mengevaluasi dan mengomunikasikan defisiensi pengendalian internal pada pihak yang bertanggung jawab agar diambil tindakan korektif.

2.1.2 *E-Procurement*

2.1.2.1 Pengertian *E-Procurement*

Adapun defenisi *e-procurement* yang dinyatakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Adrian Sutedi (2012:254) mendefinisikan Pengadaan secara elektronik (*E-procurement)* adalah

> "Sebuah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung dengan efektif, efisien, terbuka, bersaing, dan akuntabel".

Samsul Rambli (2014:325) mendefinisikan Pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*) adalah

> *"*Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. Pengadaan dilakukan dengan cara *e-tendering* dan *e-purchesing*".

Sedangkan Yustisia (2015:9) mendefinisikan Pengadaan secara elektronik (*E-procurement)* adalah

> "Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Dari definisi-definisi yang di paparkan sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan bahwa *E-Procurement* merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik berbasis *website* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengurangi kecurang.

2.1.2.2 Indikator *E-Procurement*

Aplikasi teknologi informasi yang baik dapat menyebabkan data lebih cepat diproses dan terjadi akurasinya, menurut Adrian Sutedi (2014:264) Aspek yang perlu diperhatikan dalam *e-procurement* adalah:

1) Keamanan
2) *Confidentiality* (Kerahasiaan)
3) *Integrity*
4) *Availability*
5) *Non-repudiation*

Adapun penjelasan dari aspek dari Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) adalah

1) Keamanan
   Aspek Keamanan biasanya sering kali ditinjau dari tiga hal, yaitu *Confidentiality*, *Integrity*, dan *Availability*. Namun dalam hal terdapat aspek lain yaitu aspek *non-repudiation* yang diperlukan untuk transaksi elektronik.
2) *Confidentiality*
   Confidentiality merupakan aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi. Informasi hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki hak untuk mengakses informasi tersebut, isi informasi tertutup dari siapapun kecuali yang memiliki hak/otoritas/kunci rahasia untuk membuka informasi tersebut. Aspek ini bertujuan agar informasi tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak memiliki hak akses Sistem yang digunakan untuk implementasikan *e-procurement* harus dapat menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan disimpan. Bocornya informasi dapat berakibat batalnya proses pengadaan.
3) *Integrity*
   Aspek *integrity* merupakan aspek yang menjamin bahwa data tidak boleh berubah tanpa ijin pihak yang berwenang (*authorized*). Untuk aplikasi *e-procurement*, aspek *integrity* ini sangat penting. Pelanggaran terhadap hal ini akan berakibat tidak berfungsinya sistem *e-procurement*. Secara teknis ada banyak cara untuk menjamin aspek integrity ini, seperti misalnya dengan menggunakan *messange authentication code, hash function, digital signature.*
4) *Availability*
   Aspek *availability* merupakan aspek yang menjamin bahwa data tersedia ketika dibutuhkan. Dapat dibayangkan efek yang terjadi ketika proses penawaran sedang dilangsungkan ternyata sistem tidak dapat diakses sehingga penawaran tidak dapat diterima. Misalnya ada kemungkinan pihak-pihak yang dirugikan karena tidak dapat mengirimkan penawaran.
5) *Non-repudiation*
   Apek *non-repudiation* merupakan aspek yang sangat penting dalam transaksi elektronik. Aspek ini di perlukan sebagai deteksi awal untuk menghindari adanya penyedia jasa dalam satu dalam satu kendali, aspek *non-repudiation* menjamin bahwa pelaku transaksi tidak dapat mengelak atau menyangkal telah melakukan transaksi.

2.1.3 *Fraud*

2.1.3.1 Pengertian *Fraud*

Adapun defenisi *fraud* yang dinyatakan oleh parah ahli adalah sebagai berikut:

Karyono, 2013:44 mendefinisikan *fraud* adalah

"Perbuatan penyimpangan dan melangar hukum yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi/kelompok dan akibat merugikan pihak lain".

William F. Messier, Steven M. Glover, dan Douglas F. Prawitt (2014:112) Mendefinisikan Kecurangan adalah

> "Tindakan disengaja oleh satu atau lebih orang di antara manajemen yang diberi tugas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, meliputi menggunakan kecurangan untuk mendapatkan manfaat yang tidak adil atau illegal".

ISA 220:11 dikutip oleh Theodorus M. Tuanakotta (2013:308) mendefinisikan *Fraud* (kecurangan) adalah

> "Perbuatan yang disengaja oleh sesorang atau beberapa orang di antara manajemen, TCWG (*those charged with governance*), pegawai, atau pihak ketiga, dengan menipu untuk memperoleh keuntungan yang tidak dapat dibenarkan atau keuntungan yang tidak sah/melawan hukum".

Karen L.Hooks 2011:143 mendefinisikan *Fraud is*

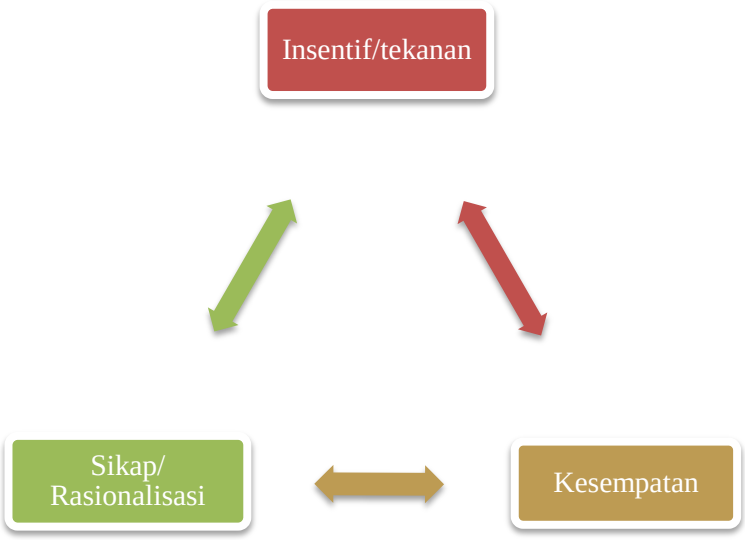
> *"Frequent cause of action in cases against auditors. Fraud can be further broken down into three distinct but related areas: constructive fraud, actual fraud and fraud as defined in securities Act of 1933 and the securities exchange act of a 1934".*

Dari definisi yang dipaparkan penulis menyimpulkan bahwa *fraud* adalah suatu tindakan yang disengaja atau tidak jujur yang dilakukan dengan

mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran, dengan maksud menipu pihak lain dan mengakibatkan pihak lain tersebut dirugikan.

2.1.3.2 Faktor Penyebab *Fraud*

Terdapat tiga kondisi yang menyebabkan terjadinya fraud sebagaimana dijelaskan dalam PSA 70 (SA 216) Rendal J. Elder dkk 2011:375, yang dinamakan dengan segitiga kecurangan (*Fraud Triangle*).



Gambar 2.2
Fraud Triangle
Sumber : Rendal J. Elder dkk 2011:375

1) Insentif/Tekanan. Manajemen atau pegawai lainnya memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
2) Kesempatan. Situasi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan.
3) Sikap/Rasionalisasi. Adanya suatu sikap, karakter, atau seperangkat nilai-nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam suatu lingkungan yang

memberikan mereka tekanan yang cukup besar sehingga menyebabkan mereka membenarkan melakukan perilaku yang tidak jujur tersebut.

2.1.3.3 Indikator *Fraud*

Menurut Karyono (2014:13) Kecurangan dapat diklasifikasikan menurut pelaku kecurangannya yaitu:

1) Kecurangan Manajemen (*Management Fraud)*
2) Kecurangan Karyawan (*Non-management Fraud*)
3) Kecurangan dari Pihak Luar Organisasi (*Ekstern*)
4) Kecurangan yang Melibatkan Orang Dalam dan Orang Luar Organisasi

Adapun penjelasan dari klasifiaksi fraud adalah sebagai berikut:

1) Kecurangan manajemen
   Kecurangan manajemen antara lain berupa kesalahan penyajian mengenai tingkat kinerja perusahaan atau unit organisasi yang sengaja dilakukan oleh karyawan dalam peran manajerialnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kecurangan tersebut. Manajemen *fraud* dilakukan oleh manajer puncak dalam suatu perusahaan yang dengan sengaja memberikan data informasi kepada para pemegang saham, kreditur, fiskus, maupun auditor independen. Pada umumnya dengan cara menerbitkan laporan keuangan yang keliru dengan maksud memberikan gambaran keuntungan perusahaan yang besar dan keuangan yang sehat untuk memperoleh kenaikan gaji atau bonus, atau sebaliknya dengan tujuan untuk menghindari pajak hal tergantung untuk pihak manakah laporan keuangan ditujukan. Manajemen *fraud* mungkin dapat juga mencakup penyewaan atau pengambilan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi.
2) Kecurangan Karyawan (*Non-management Fraud*)
   Non- management fraud merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan berupa ketidakjujuran, manipulasi, pencurian. Kecurangan itu pada umumnya melibatkan aktivitas perpindahan kekayaan seperti pengelapan atau pencurian, *mark-up* pembelian, *mark-up* biaya operasional, pengeluaran fiktif, penggelapan penerimaan, pencairan cek pembayaran ke pemasok yang dibawa, pemalsuan dokumen, penjualan yang tidak dicatat, pemakaian uang penjualan baik yang dibayarkan tunai maupun melalui cek (*kitting*) walaupun manajemen telah menciptakan langkah-langkah dan usaha-usaha tertentu untuk mencegahnya.
3) Kecurangan dari pihak luar organisasi
   Kecurangan dari pihak luar organisasi merupakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak diluar organisasi namun memiliki kepentingan

dengan pihak organisasi pihak-pihak tersebut antara lain dilakukan oleh supplier, debitur, kontraktor dengan cara:

a) Pengiriman barang yang lebih sedikit, dan penggantian barang dengan kualitas rendah.
b) Penyerahan pekerjaan dengan kualitas rendah
c) Penagihan ganda atau penagihan lebih besar dari prestasi yang diberikan.

4) Kecurangan yang melibatkan orang dalam dan orang luar organisasi
Kecurangan dalam bentuk ini berawal dari kerja sama yang tidak sehat (kolusi) atau persekongkolan negatif dari dua sisi, yaitu Organisasi dan pihak terkait dengan organisasi, seperti:

a) Pimpinan instansi/proyek pemerintah bersama kontraktor sepakat untuk menandatangani berita acara serah teriman pekerjaan yang akan dijadikan dasar pembayaran lunas terhadap pekerjaan yang tercantum dalam kontrak, padahal kenyataannya pekerjaan belum selesai.
b) Pemberian kredit oleh bank-bank kepada debitur tertentu tampa jaminan yang memadai, yang sengaja dilakukan sehingga sudah dapat dipastikan akan menjadi kredit macet dikemudian hari.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap *fraud*

Adapun pengaruh pengendalian internal terhadap fraud dikemukakan sebagai berikut:

Menurut Karyono (2013:96) mengemukakan bahwa:

"Pengendalian internal antara lain dirancang untuk dapat mengamankan harta milik organisasi. Bila pengendalian internal tidak dapat berfungsi efektif sebagai sarana kendali, kemungkinan besar terjadi *Fraud"*.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2012:103), mengemukakan bahwa: pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud*,

> "Jika pengendalian intern badan suatu usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian intern suatu badan usaha kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan bisa diperkecil".

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Faisal (2012) dalam hasil penelitiannyan mengemukankan bahwa:

> "Pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin efektif pengendalian internal perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan".

Oguda ndege joseph, dkk (2015) dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa:

> "Penerapan hubungan yang sinergis pada komponen pengendalian internal efektif mencegah kesempatan terjadinya *fraud"*.

Chairun Nisak, dkk (2013) hasil penelitian mengemukakan bahwa secara secara parsial,

> "Lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan yang efektif berpengaruh mencegah terjadinya *fraud"*.

Aditya Amanda pane (2013) Hasil penelitian yang dilakukan mengemukakan bahwa:

> "Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap perilaku kecurangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian pemerintah di suatu instansi pemrintah dapat menekan atau mengurangi terjadinya tindak kecurangan".

2.2.2 Pengaruh *E-Procurement* Terhadap *Fraud*

Adapun pengaruh *e-procurement* terhadap *farud* dikemukakan sebagai berikut:

Menurut Adrian Sutedi (2014:272) mengemukakan bahwa:

> "*E-procurement* merupakan instrumen untuk mengembangkan *Good Governance* dan pencegahan KKN baik sektor pemerintah maupun dunia usaha, penerapan e-procurement secara otomatis meningkatkan kontrol terhadap penyimpangan dan pelanggaran hukum".

Rahmawan Satriyo Nugroho, dkk (2011) dalam hasil penelitian di kabupaten magetan mengemukakan bahwa:

> "Implementasi *e-procurement* pada skpd Kabupaten Magetan mengalami peningkatan maka efektifitas pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa juga akan mengalami peningkatan".

Liya Indah Wulandari, dkk (2014) dalam hasil penelitian di kota malang mengemukakan bahwa:

> "Penerapan *e-procurement* telah mengurangi penyimpangan (*fraud)* pada pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang".

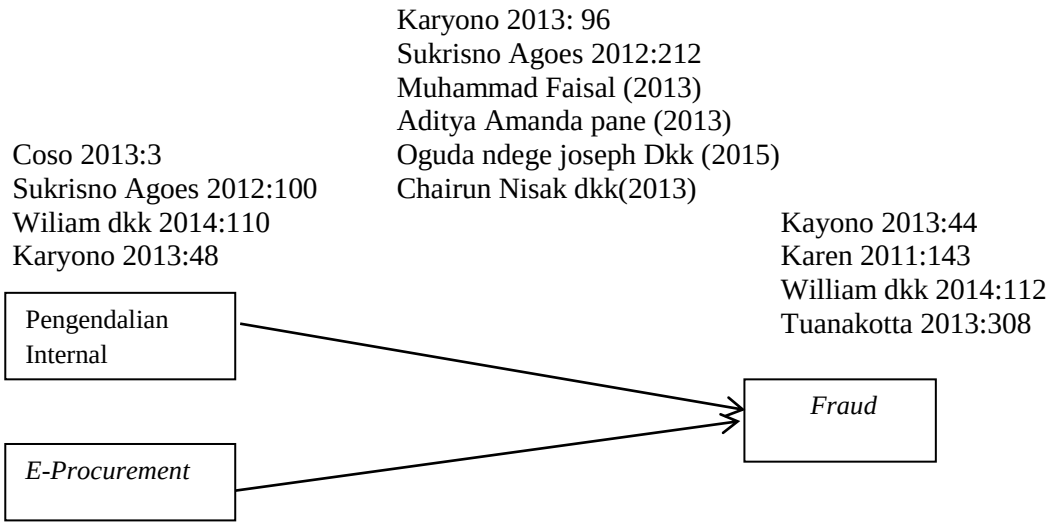
Alfred Mainassy (2013)) dalam hasil penelitian di Kabupaten Halmahera Utara mengemukakan bahwa:

> "Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten Halmahera Utara, bila dibandingkan dengan sistem lelang sebelumnya yang bersifat manual, pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Halmahera Utara ini dapat menekan dan mengurangi resiko terjadinya praktek-praktek korupsi,kolusi dan nepotisme antara implementor/panitia pengadan dengan penyedia (rekanan)".

Odi Setiawan (2014) *Outcome* hasil penelitian jangka panjang yang diperoleh

> "PLN Kota Balikpapan melalui penerapan *e-procurement* antara lain, terhindarnya peluang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara panitia, peserta dan pengelola pengadaan barang dan jasa, hasil paket pekerjaan optimal dan tahun yang bersangkutan terpenuhi, adanya penekanan biaya dari pengunaan sisi barang dan jasa, satuan kerja dan penyedia barang dan jasa, serta terciptanya kompetisi yang adil".

Paradigma Penelitian



Gambar 2.3
Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka pemikiran.

Menurut Sugiyono (2013:99) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melaluipengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris".

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai asumsi atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan yang perlu dibuktikan secara statistik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap *Fraud* pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.

H_2: *E-procurement* Berpengaruh Terhadap *Fraud* pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.